



RENJA PERUBAHAN

2017

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**





GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan karena adanya asumsi perubahan pendapatan daerah; penyesuaian asumsi penerimaan pembiayaan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016; merupakan upaya fungsionalisasi/optimalisasi/efisiensi program / kegiatan yang telah dilaksanakan dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2016 S/D TRIWULAN II TAHUN 2017
- BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2017.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

AHMAD HIJAZI



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jln. Cut Nyak Dien No... Telp. (0761) 33073, 848593, 21172, 28997 Fax. (0761) 21172, 22513
PEKANBARU – RIAU

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

**NOMOR :Kpts. /BKD/1.1/VIII/2017
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi saldo pemerintah daerah anggaran lebih tahun sebelumnya yang lebih kecil dari proyeksi, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan ditetapkanannya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ,b dan c , perlu menetapkan pengesahan tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000-2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau; dan
15. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Agustus 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904199703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 mengacu kepada arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017. Renja disusun dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap kondisi exiting Badan Kepegawaian Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun berjalan sampai Triwulan II serta pertimbangan kebutuhan tahun 2017.

Harapan kami Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau yang mana dapat menunjang visi dan misi Provinsi Riau

Pekanbaru, 21 Agustus 2017

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19650904 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-2
I.3. Maksud dan Tujuan	I-2
I.4. Dasar Pertimbangan	I-3
I.5. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD.....	II-1
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d 2016.....	II-1
II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2017 sampai dengan Triwulan II.....	II-8
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD.....	III-1
III.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.....	III-1
III.2. Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV : PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD	
	Sampai dengan Triwulan II tahun 2017	II-4
Tabel III.1.	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan	
	Tahun 2017.....	III-6



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun

2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014–2019 yaitu ***"Terwujudnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang Profesional, Akuntabel dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2025"***.

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :

Adalah sebagai pusat membangun Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan mutu Aparatur Sipil Negara dengan penyelenggaraan Sistem Manajemen Aparatur Sipil negara yang berdasarkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) agar terwujudnya pelayanan kepegawaian yang prima melalui Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel dan sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang baik profesional dan handal;.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2017.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

19. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; dan

20. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2017.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah;

- Mengevaluasi terhadap program - program dan kegiatan - kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya ;
- Mengumpulkan rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dari unit - unit dalam lingkup kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau ;
- Memilih, memilah dan menelaah rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas ;
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2017 bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

I.4 DASAR PERTIMBANGAN

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Riau sampai dengan satu semester tahun berjalan telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas

dokumen RKPD tahun 2017 dan diikuti dengan perubahan Renja OPD Tahun 2017. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2017. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Adanya kebutuhan prioritas yang mesti diutamakan untuk mempersiapkan UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai sebagai Lembaga yang terakreditasi dikarenakan UPT Assessment dan Pembinaan Rohani Pegawai menjadi sebagai pusat peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau;
3. Kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang tidak tetap sehingga adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan dari pada kebijakan kebijakan yang ada berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Kegiatan prioritas yang tidak masuk pada usulan untuk tahun berikutnya namun harus dilaksanakan pada tahun ini dimana kegiatan kegiatan tersebut untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Kondisi perubahan kerangka ekonomi daerah dimana kondisi perekonomian di Provinsi Riau sampai dengan akhir tahun 2017 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan perekonomian dunia beberapa hal yang diduga sangat signifikan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Riau adalah :

1. Pengaruh fluktuasi perekonomian global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
2. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar;
3. Pembangunan infrastruktur yang mengalami perlambatan;

4. Persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018;
5. Pembayaran utang Provinsi Riau yang haru dibayarkan.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi daerah pada tahun 2014, 2015, 2016 dan prediksi tahun 2017 dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau relative stabil. Stabilitas percepatan ekonomi terjadi pada bidang investasi, industri pengelolaan nonmigas, daya saing ekspor, pemantapan infrastruktur dan energi. Stabilitas ekonomi akan diikuti pembangunan ekonomi semakin efisien, inflasi yang terkendali, serta angka pengangguran yang semakin menurun walaupun terjadi fluktuasi harga BBM dan nilai tukar rupiah menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi pada suatu sisi. Disisi lain melemahnya nilai tukar menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi pada suatu sisi. Disisi lain melemahnya nilai tukar rupiah mendorong semakin meningkatnya ekspor komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan ekspor non migas. Oleh karenanya dengan melakukan perubahan terhadap komposisi anggaran dan belanja daerah Provinsi Riau dan melakukan rekonstruksi terhadap program kegiatan yang telah ditetapkan. Diyakini pembangunan Provinsi Riau masih tetap berjalan sesuai dengan target capaian ekonomi daerah sebagaimana telah dirumuskan pada dokumen RKPD 2017.

Dengan mempertimbangkan point diatas tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017 yang selanjutnya juga diikuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dari Badan Kepegawaian Pendidikan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Dasar Pertimbangan

I.5. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016 SAMPAI TRIWULAN II

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d 2016

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

III.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja OPD

III.2. Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja OPD Tahun 2017

BAB IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SKPD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 s/d 2016

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berkaitan dengan telah disusunnya Rencana Kerja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 dan dengan mempertimbangkan perubahan perubahan akibat pergeseran RKPD Provinsi Riau Tahun 2017, maka berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2014, pengisian table II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau s/d Triwulan II tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 :

Pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 8 program dan 99 kegiatan dengan

total anggaran biaya sebesar Rp. 49.445.313.354 dengan rincian jumlah anggaran biaya langsung (BL) sebesar Rp.30.983.884.300 dengan realisasi sebesar Rp. 18.229.447.969 atau 59,06 % realisasi fisik sebesar 60,14 % , jumlah anggaran biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 18.461.429.054 dengan realisasi sebesar Rp. 15.803.859.208 atau 85,60 % realisasi fisik tertimbang 85,60 % pencapaian relalisasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 34.103.307.177 atau 68,97 % realisasi fisik 72,87 % termasuk sedang dikarenakan beberapa hambatan yang dikarenakan : (i) Keterlambatan masa pelantikan gubernur terpilih , (ii) Polemik SOTK karena APBD tahun 2014 masih menggunakan SOTK lama sementara SOTK baru telah disahkan sehingga menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 10 program dan 121 kegiatan dengan total anggaran biaya Rp.75.510.323.215 dengan rincian yang jumlah anggaran biaya langsung (BL) sebesar Rp.51.028.502.100 dengan realisasi sebesar Rp 35.179.915.774 atau 68,94 % realisasi fisik sebesar 84,59 % , jumlah anggaran biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 24.481.821.115 dengan realisasi Rp.16.731.680.508 atau 68,34 % realisasi fisik sebesar 68,34 % pencapaian relalisasi pada tahun 2015 diatas rata rata realisasi APBD Provinsi Riau tahun 2015, adapun hambatan yang terjadi dikarenakan (i) Masa transisi perpindahan dari SOTK lama ke SOTK baru, (ii) Pejabat struktural eselon II belum ditetapkan pada awal tahun dikarenakan SOTK baru, (iii) Keterlambatan dalam pengesahan APBD Perubahan yang disahkan sudah mendekati akhir tahun 2015.

Pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 11 program dan 124 kegiatan dengan total anggaran biaya Rp.62.789.968.140,52 dengan rincian yang jumlah anggaran biaya langsung (BL) sebesar Rp.44.148.731.191,13 dengan realisasi sebesar Rp 41.488.601.571 atau 93,97 % realisasi fisik sebesar 99,83 % , jumlah anggaran biaya tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 18.641.236.949,39 dengan realisasi Rp.18.595.285.850 atau 99,75 % realisasi fisik sebesar 100 % pencapaian relalisasi pada tahun 2016 diatas rata

rata realisasi APBD Provinsi Riau tahun 2016 dan sangat baik.

TABEL II.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra OPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD s/d Tahun 2017)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
I		PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	28.444.684.959	18.379.165.623	20%	4.587.641.300	794.282.902	1.580.976.473	-	-	-	-	2.375.259.375		20.754.424.998	14=6+12	15=14/8x100%	16	17							
1	3.00.03.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pengiriman surat menyurat	60	bulan	242.322.435	36	bulan	131.671.000	12	bulan	23.400.000	-	3.000.000	-	5.306.600	23%	36	136.977.600	60%	57%	Sekretariat	BKD				
2	3.00.03.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60	bulan	5.106.117.943	36	bulan	2.119.230.925	12	bulan	969.000.000	-	164.204.275	-	385.727.939	57%	36	2.669.163.139	60%	52%	Sekretariat	BKD				
3	3.00.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Kendaraan dinas/operasional	70	unit	2.085.443.252	42	unit	1.047.131.690	14	unit	189.742.800	-	40.840.900	-	97.159.100	73%	42	1.185.131.690	60%	57%	Sekretariat	BKD				
4	3.00.03.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor BKD Provinsi Riau	150	orang	5.249.379.024	30	orang	3.026.709.100	30	orang	700.000.000	-	107.206.000	-	188.760.000	42%	30	3.322.675.100	20%	63%	Sekretariat	BKD				
5	3.00.03.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis item alat tulis kantor BKD	185	item	2.117.777.379	37	item	538.540.750	37	item	100.000.000	-	25.120.550	-	50.341.100	75%	37	613.902.400	20%	29%	Sekretariat	BKD				
6	3.00.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan unit mencetak dan menggandakan kebutuhan kantor	60	bulan	1.538.456.345	36	bulan	570.607.000	12	bulan	100.000.000	-	91.505.800	-	91.505.800	92%	36	662.112.800	60%	43%	Sekretariat	BKD				
7	3.00.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.740	buah	417.557.325	3.444	buah	335.517.600	1.148	buah	92.498.500	-	22.784.250	-	22.784.250	25%	3.444	358.301.850	60%	86%	Sekretariat	BKD				
8	3.00.03.01.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor BKD	36	unit	-	18	unit	4.212.325.400	18	unit	300.000.000	-	2.269.200	-	256.300.000	86%	18	4.470.894.600	50%	#DIV/0!	Sekretariat	BKD				
9	3.00.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2640/20	exs/buku	1.053.357.945	528/4	exs/buku	473.589.500	528/4	exs/buku	70.000.000	-	27.750.000	-	55.500.000	79%	-	529.089.500	0%	50%	Sekretariat	BKD				
10	3.00.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat	60	bulan	1.211.448.633	36	bulan	574.167.500	12	bulan	200.000.000	3	50.000.000	3	-	6	50.000.000	50	25%	42	624.167.500	70%	52%	Sekretariat	BKD	
11	3.00.03.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	bulan	4.273.449.768	36	bulan	2.280.022.558	12	bulan	700.000.000	-	128.022.727	-	223.639.934	50%	36	2.631.865.219	60%	62%	Sekretariat	BKD				
12	3.00.03.01.01.019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga Keamanan Kantor BKD Provinsi Riau	100	orang	3.651.133.810	60	orang	2.198.021.000	20	orang	788.000.000	-	104.025.000	-	155.060.000	32%	60	2.457.106.000	60%	67%	Sekretariat	BKD				
13	3.00.03.01.01.116	Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)	Jumlah Pameran Pembangunan (Riau Expo) yang Riau	5	pameran	899.064.300	3	pameran	542.643.200	1	pameran	75.000.000	-	-	-	-	0%	3	542.643.200	60%	60%	Sekretariat	BKD				
14	3.00.03.01.01.124	Rapat Koordinasi BKD Se-Propinsi Riau	Jumlah dokumen Rapat Koordinasi BKPD Se-Propinsi	5	dokumen	597.176.800	3	dokumen	328.988.400	1	dokumen	270.000.000	1	119.080.000	-	102.326.000	-	1	221.406.000	100	82%	4	550.394.400	80%	92%	Sekretariat	BKD
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																53%											
Prediksi Kinerja																50%											
II		PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja (%)	18.468.727.565	12.519.517.610	48%	1.191.341.600	57.678.200	833.287.050	-	-	-	-	890.965.250		13.410.482.860			73%								
	3.00.03.01.02.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	163	unit	2.152.000.000	-	2.094.077.152	-	-	-	-	-	-	-	2.094.077.152	0%	0%	0%	0%	Sekretariat	BKD					
15	3.00.03.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	unit	4.607.752.750	2	unit	5.249.941.048	2	unit	900.000.000	-	8.960.000	-	720.158.550	81%	2	5.979.059.598	100%	0%	Sekretariat	BKD				
16	3.00.03.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	108	unit	278.832.685	15	unit	108.729.600	93	unit	71.341.600	-	9.838.500	-	9.838.500	14%	15	190.568.100	14%	68%	Sekretariat	BKD				
17	3.00.03.01.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	388	unit	3.247.617.899	103	unit	655.390.000	160	unit	220.000.000	-	48.718.200	-	103.290.000	69%	103	807.398.200	27%	25%	Sekretariat	BKD				
	3.00.03.01.02.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	3	unit	8.182.524.231	1	unit	4.339.379.810	2	unit	-	-	-	-	-	0%	1	4.339.379.810	33%	0%	Sekretariat	BKD				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																55%											
Prediksi Kinerja																50%											
III		PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	7.732.352.089	2.847.674.997	15%	1.075.391.300	32.692.800	78.483.400	-	-	-	-	111.176.200		2.958.851.197			38%								
18	3.00.03.01.03.002	Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakain dinas berserta perlengkapannya	721	orang	368.360.825	313	-	120	stiel	132.132.200	-	-	-	-	-	0%	313	-	43%	0%	Sekretariat	BKD				
	3.00.03.01.03.003	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	721	orang	368.360.825	313	-	199.172.900	120	orang	-	-	-	-	-	0%	313	199.172.900	43%	54%	Sekretariat	BKD				
19	3.00.03.01.03.006	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan fisik dan mental	840	orang	789.603.317	504	orang	467.641.200	120	orang	55.000.000	-	3.000.000	-	14.480.000	32%	504	485.121.200	60%	61%	Sekretariat	BKD				
20	3.00.03.01.03.012	Pelaksanaan Sumpah/Janj PNS	Jumlah pegawai yang diambil sumpah janjinya	905	orang	403.430.685	200	orang	143.560.665	200	orang	87.644.100	-	-	-	-	0%	200	143.560.665	22%	36%	KHK	BKD				
21	3.00.03.01.03.013	Pemantauan disiplin PNS	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin PNS	5.935	orang	2.076.038.585	3.561	orang	898.619.540	1.187	orang	180.000.000	-	7.846.800	-	9.873.200	10%	3.561	196.339.540	60%	44%	KHK	BKD				
22	3.00.03.01.03.014	Penanganan Kasus-kasus kepegawaian	Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian	103	orang	872.699.259	35	orang	505.165.467	60	orang	185.000.000	-	21.846.000	-	62.081.000	34%	35	567.246.467	34%	65%	KHK	BKD				
23	3.00.03.01.03.016	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah Konseling Psikologi Permasalahan ASN	600	orang	1.547.269.688	150	orang	301.483.400	150	orang	285.615.000	-	13.895.200	-	13.895.200	5%	150	135.378.600	25%	20%	UPT. Assessment	BKD				
	3.00.03.01.03.009	Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	Jumlah orang yang mengikuti Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	400	orang	900.202.080	80	orang	190.940.500	50	orang	-	-	-	-	-	0%	80	190.940.500	20%	21%	UPT. Assessment	BKD				
24	3.00.03.01.03.019	Pengelolaan (LHPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang melaporkan (LHPAN)	3.561	orang	406.386.825	88	orang	141.091.325	80	orang	150.000.000	-	-	-	-	0%	88	141.091.325	2%	35%	KHK	BKD				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																11%											
Prediksi Kinerja																50%											
IV		PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 80 jam pelajaran	24.731.898.806	4.115.728.988	7%	957.338.500	131.364.828	108.347.800	-	-	-	-	239.712.628		4.355.441.616			18%								
25	3.00.03.01.05.025	Diklat kompetensi dan pengembangan Widwaiswara	Jumlah widwaiswara yang mengikuti diklat Pengembangan Kompetensi widwaiswara	334	orang	5.136.416.177	57	orang	714.213.282	18	orang	305.220.000	-	106.617.928	-	44.487.000	50%	57	865.318.210	17%	17%	Pengembangan	BKD				
26	3.00.03.01.05.026	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional Pegawai Pemerintahan Provinsi Riau	90	orang	2.076.791.500	35	orang	591.235.355	25	orang	401.948.000	-	26.798.898	-	26.798.898	7%	35	618.034.253	39%	30%	Pengembangan	BKD				
	1.20.1.20.10.05.027.	Diklat TOT Widwaiswara	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat TOT Widwaiswara	120	orang	970.258.875	-	30	orang	-	30	orang	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	UPT. Diklat	BPSDM					
	1.20.1.20.10.05.029.	Diklat Training Officer Course (TOC)	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Training Officer Course (TOC)	90	orang	874.388.477	30	orang	196.287.600	30	orang	-	-	-	-	-	0%	30	196.287.600	33%	22%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.030.	Diklat Management of Training (MOT)	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Management Of Training (MOT)	90	orang	874.388.477	30	orang	187.753.309	30	orang	-	-	-	-	-	0%	30	187.753.309	33%	21%	UPT. Diklat	BPSDM				
27	3.00.03.01.05.032	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis Pegawai Pemerintahan Provinsi Riau	128	orang	970.967.875	53	orang	518.825.250	15	orang	250.170.500	-	24.746.900	-	37.061.902	25%	53	580.634.052	41%	60%	Pengembangan	BKD				
	1.20.1.20.10.05.033	Diklat analisis kebutuhan diklat	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Analisis kebutuhan Diklat	300	orang	1.286.448.800	30	orang	124.427.400	60	orang	-	-	-	-	-	0%	30	124.427.400	10%	10%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.034.	Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Analisa Jabatan Dan Beban Kerja	260	orang	1.323.025.750	30	orang	130.701.800	60	orang	-	-	-	-	-	0%	30	130.701.800	12%	10%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.035.	Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	270	orang	1.148.850.750	60	orang	98.272.200	60	orang	-	-	-	-	-	0%	60	98.272.200	22%	9%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.036.	Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Teknis Administrasi Kearsipan	270	orang	1.143.150.750	30	orang	126.042.300	60	orang	-	-	-	-	-	0%	30	126.042.300	11%	11%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.037.	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	150	orang	454.008.750	30	orang	88.992.000	30	orang	-	-	-	-	-	0%	30	88.992.000	20%	20%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.038.	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	150	orang	462.828.750	30	orang	91.864.000	30	orang	-	-	-	-	-	0%	30	91.864.000	20%	20%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.039.	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	150	orang	423.768.750	30	orang	88.882.000	30	orang	-	-	-	-	-	0%	30	88.882.000	20%	21%	UPT. Diklat	BPSDM				
	1.20.1.20.10.05.040.	Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Penyusunan Standar Kompetensi	120	orang	603.842.875	30	orang	125.235.000	30	orang	-	-	-	-	-	0%	30	125.235.000	25%	21%	UPT. Diklat	BPSDM				

11-5

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra OPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu 2016		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100M	14=6+12	15=14/6x100M	16			17					
VIII				PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan fungsi	68.345.186.147	19.052.897.350	20%	9.295.663.292	299.175.595	1.959.471.252	-	-	-	2.258.646.847	Prediksi Kinerja	50%	21.311.544.197	31%									
	3.00.03.01.17.0	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Modul Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	53	unit	612.910.931	2	aplikasi	79.775.663									2	79.775.663	4%	13%	Adm Kepegawaian	BKD					
44	3.00.03.01.17.008	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang menerima Penghargaan PNS Berprestasi	180	orang	4.459.448.942	72	orang	2.561.521.625	18	orang	885.000.000	-	24.132.800	18	824.266.000	-	-	18	848.398.800	1	96%	90	3.409.920.425	50%	76%	KHK	BKD
45	3.00.03.01.17.030	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah SKPD yang mengikuti Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa beban kerja	65	SKPD	3.608.911.675	20	SKPD	530.743.600	25	SKPD	500.000.000	-	-	-	78.909.400	-	-	-	78.909.400	-	16%	20	609.653.000	31%	17%	Adm Kepegawaian	BKD
46	3.00.03.01.17.031	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Riau yang menerima Satya Lencana Karya Satya	1.569	orang	2.279.547.871	1.188	orang	385.083.269	500	orang	150.000.000	-	16.390.000	-	29.647.000	-	-	-	46.037.000	-	31%	1.188	431.120.269	76%	19%	KHK	BKD
47	3.00.03.01.17.035	Monitoring dan Evaluasi Tapetarium dan taspen PNS se Provinsi Riau	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Tapetarium dan Taspen PNS Se-Propinsi Riau	5	dokumen	551.259.000	3	dokumen	340.492.000	1	dokumen	97.235.000	-	5.100.000	-	69.995.400	-	-	-	75.095.400	-	77%	3	415.587.400	60%	75%	KHK	BKD
	1.20.1.20.10.30.036	Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Jumlah Orang yang telah Mengikuti Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	290	orang	603.032.675	60	orang	-	60	orang										60	-	-	21%	0%	Adm Kepegawaian	BKD	
	1.20.1.20.10.30.037	Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	370	orang	748.064.225	60	orang	-	60	orang										60	-	-	16%	0%	Adm Kepegawaian	BKD	
	1.20.1.20.10.30.038	Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi	330	orang	883.545.425	90	orang	84.203.000	90	orang										90	84.203.000	27%	10%	KHK	BKD		
	1.20.1.20.10.30.039	Bimbingan teknis Manajemen Konstruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Konstruksi Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi	230	orang	531.344.725	60	orang	-	60	orang										60	-	-	26%	0%	KHK	BKD	
	1.20.1.20.10.30.041	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau	Jumlah Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bagi PNS Provinsi	280	orang	481.344.725	60	orang	90.450.000	60	orang										60	90.450.000	21%	19%	Mutasi	BKD		
	1.20.1.20.10.30.043	Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	380	orang	531.344.725	60	orang	87.791.888	60	orang										60	87.791.888	16%	17%	KHK	BKD		
	1.20.1.20.10.30.044	Workshop Kegiatan bagi PPTK	Jumlah Pegawai yang mengikuti Workshop Kegiatan Rasi PPTK	255	orang	427.189.225	60	orang	77.942.000	60	orang										60	77.942.000	24%	18%	UPT, Diklat	BPSDM		
48	3.00.03.01.17.047	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKD	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang dikirim mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek	192	orang	1.384.847.433	190	orang	1.328.665.462	12	orang	150.000.000	-	28.158.000	-	37.266.000	-	-	-	65.424.000	-	44%	190	1.394.089.462	99%	101%	Sekretariat	BKD
	1.20.1.20.10.30.048	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	375	orang	2.419.775.188	60	orang	401.943.600												60	401.943.600	16%	17%	Sekretariat	BKD		
	1.20.1.20.10.30.049	Assesment Center Provinsi Riau	Jumlah Assesment Center Provinsi Riau	3.316	orang	18.935.316.972	1.339	orang	3.003.284.250												1.339	3.003.284.250	40%	16%	UPT, Assessment	BKD		
	1.20.1.20.10.30.050	Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Trainin	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dengan Emotional Spritritual Quotient	380	orang	671.529.825	60	orang	90.450.000												60	90.450.000	16%	13%	UPT, Assessment	BKD		
49	3.00.03.01.17.057	Monitoring IPDN	Jumlah Dokumen yang disusun pada pelaksanaan Monitoring IPDN	5	dokumen	760.168.400	3	dokumen	504.907.600	1	dokumen	607.751.000	-	53.155.600	-	27.636.500	-	-	-	80.792.100	-	13%	3	585.699.700	60%	77%	Pengembangan	BKD
	1.20.1.20.10.30.058	Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara	4	dokumen	688.269.293	1	dokumen	94.299.900												1	94.299.900	25%	14%	Pengembangan	BKD		
50	3.00.03.01.17.060	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan evaluasi jabatan fungsional PNS	4	dokumen	518.857.355	-	1	dokumen	150.509.592	-	17.144.000	-	55.888.000	-	-	-	-	-	73.032.000	-	49%	-	73.032.000	0%	14%	Pengembangan	BKD
51	3.00.03.01.17.066	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Jumlah Dokumen Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	5	dokumen	1.152.740.833	2	dokumen	626.619.600	1	dokumen	150.000.000	-	-	-	23.198.600	-	-	-	23.198.600	-	15%	2	651.818.200	40%	57%	Adm Kepegawaian	BKD
52	3.00.03.01.17.067	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	5	dokumen	872.306.439	2	dokumen	388.586.193	1	dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	2	388.586.193	40%	45%	Adm Kepegawaian	BKD	
53	3.00.03.01.17.068	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah orang yang mengikuti seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara	764	orang	5.813.227.355	168	orang	1.229.375.100	250	orang	1.101.220.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	168	1.229.375.100	22%	21%	Adm Kepegawaian	BKD	
	1.20.1.20.10.30.069	Seleksi Penerimaan IPDN	Jumlah Penerimaan IPDN	188	orang	1.589.802.312	22	orang	234.496.500												22	234.496.500	12%	15%	Adm Kepegawaian	BKD		
54	3.00.03.01.17.070	Pengeloan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyusalan iajazah	Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas, dan Ujian Kenaikan Danrkat Penyusalan Ijazah	1.115	orang	1.761.441.427	280	orang	412.424.250	200	orang	248.430.000	-	-	-	24.696.400	-	-	-	24.696.400	-	10%	280	437.120.650	25%	25%	Adm Kepegawaian	BKD
	1.20.1.20.10.30.071	Rakor Widayawara	Jumlah dokumen Rakor Widayawara	5	dokumen	674.264.200	1	dokumen	129.188.550												1	129.188.550	20%	19%	UPT, Diklat	BPSDM		
55	3.00.03.01.17.073	Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	5	dokumen	1.031.513.125	1	dokumen	219.278.000	1	dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	1	219.278.000	20%	21%	Pengembangan	BKD	
	1.20.1.20.10.30.074	Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah Aplikasi E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	18	aplikasi	6.546.136.750	2	aplikasi	4.408.018.761												2	4.408.018.761	11%	67%	Adm Kepegawaian	BKD		
56	3.00.03.01.17.075	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah dokumen Pengembangan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (e-document)	3	tahun	815.055.100	1	tahun	198.255.100	1	tahun	308.400.000	-	4.000.000	-	78.080.000	-	-	-	82.080.000	-	27%	1	280.335.100	33%	34%	Adm Kepegawaian	BKD
57	3.00.03.01.17.089	Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Propinsi Riau	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Propinsi Riau	4	dokumen	1.031.513.125	1	dokumen	371.894.637	1	dokumen	150.000.000	-	-	-	128.524.000	-	-	-	128.524.000	-	86%	1	500.418.637	25%	49%	KHK	BKD
	1.20.1.20.10.30.105	Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	85	orang	226.701.800	60	orang	102.267.000												60	102.267.000	71%	45%	Sekretariat	BKD		
	1.20.1.20.10.30.106	Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	200	orang	403.606.525	30	orang	45.225.000												30	45.225.000	15%	11%	Sekretariat	BKD		
	1.20.1.20.10.30.107	Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas	130	orang	321.119.363	30	orang	40.333.000												30	40.333.000	23%	13%	Sekretariat	BKD		
	1.20.1.20.10.30.108	Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen Karier Aparatur Sipil Negara	3	dokumen	3.691.541.400	-	-	-												-	-	0%	0%	Sekretariat	BKD		
58	3.00.03.01.17.098	Perlombaan dalam Rangka HUT KORPRI	Jenis cabang olahraga yang diperlombakan dalam Rangka HUT KORPRI	16	cabor			8	cabor	181.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-			Sekretariat	BKD		
59	3.00.03.01.17.109	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi program dan kegiatan	5	dokumen	848.599.908	3	dokumen	391.086.625	1	dokumen	200.000.000	-	11.400.000	-	69.510.000	-	-	-	80.910.000	-	40%	3	471.996.625	60%	56%	Sekretariat	BKD
60	3.00.03.01.17.114	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah Modul aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	3	aplikasi	340.617.500	2	aplikasi	340.617.500	-	37.942.700	-	75.309.900	-	-	-	-	-	-	113.252.600	-	33%	-	113.252.600	0%	#DIV/0!	Adm Kepegawaian	BKD
61	3.00.03.01.17.115	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah pejabat Provinsi Riau yang mengikuti seleksi jabatan tinggi	140	orang			70	orang	1.450.000.000	-	74.610.895	-	250.971.700	-	-	-	-	-	325.582.595	-	22%	-	325.582.595			UPT, Assessment	BKD
62	3.00.03.01.17.116	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Pemetaan Jabatan Administrasi	870	orang			870	orang	1.450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-			UPT, Assessment	BKD	
63	3.00.03.01.17.117	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial yang disusun	2	dokumen			1	dokumen	250.000.000	-	19.036.200	-	53.420.200	-	-	-	-	-	72.456.400	-	29%	-	72.456.400			UPT, Assessment	BKD
64	3.00.03.0																											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :	

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2017 sampai dengan Triwulan ke II

Realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (30 Juni) anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2017 sebesar Rp.46.682.566.330,57 dengan rincian realisasi belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 17.496.695.838,57 realiasi Rp.7.248.360.787 atau 41, 43 % , dan belanja langsung Rp 29.185.870.492 realiasasi Rp.9.566.744.983 atau 32, 78 (%) terdiri dari 11 Program dan 83 Kegiatan dengan relasasi kegiatan yang telah selesai sebanyak 10 kegiatan serta capain target kinerja sebesar 30 %

Secara ringkas realisasi pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2017 hingga triwulan II ditunjukan pada tabel II.1

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPD

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

III.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tahun 2017

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai :

Adapun tujuan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2017 bagi setiap bagian dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 adalah :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang ada untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2018
2. Tersusunya Program dan kegiatan dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

III.2. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses Rencana Kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmark) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada perubahan rencana kerja tahun 2017 pada OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 dalam aspek Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk Pemanjapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintah serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam mencapai sasaran strategis ini dana yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017 untuk Belanja Langsung (BL) dengan pagu adalah sebesar Rp. 23.978.315.808 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah) bergeser dari pagu sebelumnya Rp. 29.185.870.492 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perkiraan maju pagu Belanja Langsung (BL) tahun 2018 sebesar Rp.31.413.766.766 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Dan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan pagu sebesar Rp. 17.799.039.836,45 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh lima sen) dan bergeser dari pagu sebelumnya Rp.17.496.695.838,57 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perkiraan maju pagu Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2018 Rp.18.167.709.293,73 (delapan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tiga sen)

Jadi total pagu perubahan untuk Badan Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp.41.777.355.644,45 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah koma empat puluh lima sen) bergeser dari pagu sebelum/murni Rp. 46.682.566.330,57 (empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah koma lima puluh tujuh sen) terjadi pengurang sebesar Rp. 4.905.210.686,12 (empat miliar sembilan ratus lima juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah koma dua belas sen).

Pengurangan yang dilakukan terhadap

1. Anggaran belanja tidak langsung
2. Anggaran perjalanan dinas dan kegiatan yang dirasionalisasikan dari belanja langsung

Untuk tahun 2017 terdapat 10 Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 yaitu :

Non Urusan

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
: 13 Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
: 3 Kegiatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
: 5 Kegiatan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
: 6 Kegiatan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: 3 Kegiatan

Urusan Wajib

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
: 33 Kegiatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: 19 Kegiatan

3. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
: 14 Kegiatan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
: 2 Kegiatan
5. Program Pendidikan Kedinasan
: 5 Kegiatan

Adapun rincian perubahan rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**TABEL III.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA OPD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.00.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								23.978.315.808	21.175.561.116		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan tahun 2017	3000 surat			4.986.893.616	4.214.252.620		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pekanbaru			Jumlah surat yang dikirim selama 12 bln	1600 surat	13.404.000	23.517.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			Pekanbaru			Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	1.211.509.000	976.245.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pekanbaru			Jumlah Kendaraan dinas/operasi onal yang dipelihara	10 Unit Mobil dan 4 Unit Motor	253.446.800	189.402.800	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pekanbaru			Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	700.000.000	692.574.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pekanbaru			Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	100.000.000	84.092.600	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			Pekanbaru			Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	100.000.000	100.500.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pekanbaru			Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	92.498.500	74.985.220	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			Pekanbaru			Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179 Unit	352.385.000	481.050.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan			Pekanbaru			Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-u ndangan	12 bulan	69.000.000	69.000.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman			Pekanbaru			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	9.800 Porsi	200.000.000	99.600.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Pekanbaru			Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	122 Kali	927.223.316	699.466.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Pekanbaru			Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor	23 Orang	652.365.000	648.820.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.116	Pameran Pembangunan (Riau Expo)			Pekanbaru			Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	1 Kali	75.000.000	75.000.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.01.124.	Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi BKD se provinsi riau	1 Dokumen	240.062.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		terlaksannnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	86 unit			1.489.940.600	545.454.100		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			-			-	-	0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	1.162 m2	1.198.599.000	258.454.100	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			-			terpeliharaan ya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 unit	0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			-			terlaksananya a pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	125 unit	0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pekanbaru			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	86 Unit	71.341.600	70.000.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor			Pekanbaru			Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	523 Unit	220.000.000	217.000.000	Sedang Berjalan	

3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik dan mental	3149 orang			567.489.000	324.029.300		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			-					0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.006	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur			Pekanbaru			Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental	120 Orang	55.000.000	52.489.700	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.012.	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS			Pekanbaru			Jumlah PNS yang diambil sumpah janjinya	-	0	26.616.200	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.013	Pemantauan disiplin PNS			Pekanbaru			Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Propinsi Riau	1 Dokumen	108.884.000	73.291.700	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.014.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian			Pekanbaru			Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian	60 Kasus	120.608.000	105.466.400	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.016	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN			Pekanbaru			Jumlah ASN yang mengikuti konseling psikologi	150 Orang	161.509.000	66.165.300	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.03.019	Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau			Pekanbaru			Terlaksananya a Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	1.124 Orang	121.488.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		peningkatan sumber daya PNS melalui kursus pendidikan, penjenjangan dan	26 orang			888.322.500	575.916.600		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal			-			Tercapainya peningkatan keterampilan dan kemampuan PNS di lingkungan Set DP KIRIBRI Provinsi Riau	26 orang	0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.05.025	Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara			Luar Daerah			Widyaiswara yang meningkat kompetensinya	18 Orang	299.820.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.05.026	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau			Luar Daerah			Jumlah PNS Pemprov Riau yang mengikuti diklat fungsional tertentu	25 Orang	373.580.000	575.916.600	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.05.032.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau			Pekanbaru			PNS Provinsi Riau yang mengikuti Diklat Teknis	15 Orang	214.922.500	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		terselenggaranya kegiatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2017	1 laporan			322.979.400	27.167.140		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Pekanbaru			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD yang disusun	1 Dokumen	61.286.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Pekanbaru			Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	36.500.000	27.167.140	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.06.003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Pekanbaru			Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	36.000.000	-	Baru	
3.00.03.3.00.03.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Pekanbaru			Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun	1 Dokumen	58.990.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.06.005	Penyusunan Rencana Kerja SKPD			Pekanbaru			Tersedianya dokumen renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017	5 dokumen	100.000.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.06.009	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)			Pekanbaru			Terlaksananya penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3 Dokumen	30.203.400	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.15.	Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belaiar	50 Orang			4.751.761.500	6.063.105.800		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.15.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara			Luar Daerah			Jumlah PNS Pemprov Riau yang mendapatkan beasiswa tugas belajar	38 Orang	3.765.972.000	4.741.676.200	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.15.009	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)			Luar Daerah			Jumlah Pejabat Eselon I yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I	2 Orang	81.418.400	71.170.100	Sedang Berjalan	

3.00.03.3.00.03.01.15.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)			Luar Daerah		Jumlah Pejabat Eselon II yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan Tingkat II	6 Orang	532.220.000	670.985.900	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.15.013	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)			Pekanbaru		Jumlah Pejabat Pemprov Riau yang mengikuti Seleksi	60 Orang	152.280.700	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.15.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas			Luar Daerah		Jumlah STTD mengikuti pendidikan kedinasan	17 Orang	219.870.400	579.273.600	Baru	
3.00.03.3.00.03.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		Persentase sumber daya aparatur yang meningkat	7 Persen		1.749.499.500	494.649.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.16.030	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau			Pekanbaru		Jumlah anggota Dewan Pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi	143 Orang	146.350.000	153.735.800	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.044.	Diklat Teknis ke Widyaiswara Berjenjang			Luar Daerah		Jumlah widyaiswara yang dikirim mengikuti Diklat Berjenjang	3 Orang	95.762.500	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.045	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur			Luar Daerah		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kemampuan tenaga teknis Fungsional Perencana Aparatur	19 Orang	797.148.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.049	Seleksi Asesor Provinsi Riau			Pekanbaru		PNS yang mengikuti seleksi Asesor Provinsi Riau	50 Orang	184.764.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.050.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau			Pekanbaru		Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan	15 Orang	431.470.000	201.499.100	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.067	PORDA Korpri			-				0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.068.	PORNAS Korpri			-		Terwujudnya PORDA KORPRI Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2017	100 Persen	0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.072	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI			Pekanbaru		Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	1 Kegiatan	94.005.000	61.357.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.16.073	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal			Pekanbaru		Terlayannya proses persemayaman dan pemakaman bagi anggota Korpri	-	0	78.057.100	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan Pemerintah	25 Persen		6.216.155.692	7.170.895.458		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.17.008.	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi			Pekanbaru		Terlaksananya a Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi Kerja baik	18 orang	854.027.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.030	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja			Pekanbaru		Jumlah dokumen penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja	1 Dokumen	495.647.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.031	Satya Lencana Karya Satya			Pekanbaru		Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satya Lencana	500 Orang	142.020.000	113.044.800	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarium dan taspen PNS se Provinsi Riau			12 Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tapetarium dan taspen PNS se Provinsi	1 Dokumen	87.459.000	69.826.300	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.047	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKD			Luar Daeah		Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek	15 Orang	150.000.000	100.000.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.057.	Monitoring IPDN			8 Kampus Regional, 1 Kampus Pusat		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Monitoring IPDN di 8 Regional Kampus IPDN	1 Dokumen	386.053.000	213.960.900	Sedang Berjalan	

3.00.03.3.00.03.01.17.060	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau			12 Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	140.159.592	92.674.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.066	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011			12 Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.800.000	114.912.600	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.067	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau			-				0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.068	Pengadaan Aparatur Sipil Negara			Pekanbaru		Jumlah peserta Pengadaan Aparatur Sipil Negara	250 Orang	839.408.200	877.624.700	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.070	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah			Pekanbaru		Terlaksananya a Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	300 Orang	240.630.000	192.433.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.075	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)			Pekanbaru		Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	2000 Dokumen	234.802.000	224.942.700	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.089	Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Propinsi Riau			12 Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Propinsi Riau	1 Dokumen	125.465.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.098	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI			Pekanbaru		Jumlah jenis cabang olahraga yang dipertandingkan antar OPD Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka memeriahkan Ulang Tahun KORPRI	1 Kegiatan	88.190.000	104.527.300	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.102	Halal Bi Halal dan Pelepasan Jemaah Haji			-				0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.109	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan			12 kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan Manajemen Kepegawaian dengan BKD 12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	166.787.500	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.114	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau			Pekanbaru		Tersedianya e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	1 Aplikasi	243.549.500	4.221.199.958	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.115	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau			Pekanbaru		Jumlah Pejabat Tinggi yang mengikuti seleksi jabatan tinggi Provinsi Riau	67 orang	1.421.666.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.116	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau			Pekanbaru		Jumlah Jabatan Administrasi Provinsi Riau yang terpetaan berdasarkan kompetensinya	-	0	364.580.800	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.117	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau			Pekanbaru		Terlaksananya penyusunan standar kompetensi ASN Provinsi Riau	1 Dokumen Standar Kompetensi ASN Provinsi Riau	178.582.200	164.380.900	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.118	Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi			Pekanbaru		Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment Provinsi Riau	1 Aplikasi Psikometri dan Data Base Assessment Provinsi Riau	201.066.000	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.119	Penyusunan Materi/Alat Test			-				0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.120	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau			12 Kabupaten/kota se-Propinsi Riau		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kab/Kota Se-Propinsi Riau	1 Dokumen	86.631.200	150.000.000	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.17.121	Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan KORPRI Kabupaten/Kota			-				0	-	Sedang Berjalan	

3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah		Terlaksananya Penyesuaian Pelayanan Administrasi	86 Persen		2.653.860.400	1.547.751.998		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.18.001	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS			Pekanbaru			Jumlah PNS Pindah Tugas	2400 Orang	300.000.000	241.926.100	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.006	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah PNS Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	3000 Orang	500.000.000	248.746.000	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.008	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu			Pekanbaru			Jumlah usulan SK jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau	2000 orang	313.730.000	107.622.900	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.010	Pengelolaan administrasi izin belajar			Pekanbaru			Terlaksananya a Pengelolaan Administrasi Izin Belajar	150 Orang	30.598.000	-	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.011	Pengelolaan Administrasi kepegawaian			Pekanbaru			Jumlah PNS Provinsi Riau yang di data melakukan administrasi kepegawaian	300 Orang	72.746.500	159.924.500	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.012	Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik			Pekanbaru			Jumlah KPE Provinsi Riau yang diusulkan	160 KPE	60.540.000	-	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.013	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah dokumen penyusunan formasi PNS Provinsi Riau	1 Dokumen	333.250.500	226.836.600	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.016	Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah liputan kegiatan BKD setiap bulan	12 Kegiatan	105.000.000	114.963.000	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.017	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah usulan SK PNS Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	2000 orang	320.000.000	209.331.000	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.019	Pengelolaan Data Kepegawaian			Pekanbaru			Terlaksananya Pengelolaan data kepegawaian (4 Dokumen)	8100 orang	183.126.000	-	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.020	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah PNS Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau yang dilantik dan di sumpah	2000 Orang	78.781.000	19.569.900	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.021	Pengelolaan Website BKP2D Provinsi Riau			Pekanbaru			Jumlah website yang dikelola	1 Website	62.638.400	51.643.898	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.022	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik			Pekanbaru			Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	150.000.000	103.214.000	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.18.023	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu			Pekanbaru			Jumlah jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau yang diusulkan angka	100 Orang	143.450.000	63.974.100	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan	90 Persen		351.413.600	212.339.100		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.19.002	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS			Pekanbaru			Jumlah PNS Memasuki Masa Pensiun yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta	80 Orang	83.277.600	75.923.200	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.19.005	Pengelolaan Pensiun PNS			Pekanbaru			Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS	500 orang	268.136.000	136.415.900	Sedang Berjalan
3.00.03.3.00.03.01.21.	Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		Terselenggaranya kegiatan pemantapan usaha bagi anggota Korpri / pns II angkatan	50 orang		0	-		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.03.3.00.03.01.21.001	Pemantapan Usaha Bagi Anggota KORPRI			-				0	-	Sedang Berjalan	
3.00.03.3.00.03.01.21.005	KORPRI Peduli Pada Anggota KORPRI dan Masyarakat			-				0	-	Sedang Berjalan	
3.00.05.	FUNGSI LAINNYA							0	-		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.05.3.00.03.01.22.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		Peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian anggota Korpri	3 Kab / 300 orang		0	-		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3.00.05.3.00.03.01.22.005	Pemantapan wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian			-				0	-	Sedang Berjalan	

4.00.01.	KEPALA DAERAH							0	181.928.900		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4.00.01.3.00.03.01.18.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	Meningkatkan Efektivitas dan Integritas Pemerintah Daerah		terwujudnya peningkatan pemahaman pengurus dan anggota tentang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	5 kegiatan		0	181.928.900		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4.00.01.3.00.03.01.18.007	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum			-				0	-	Sedang Berjalan	
4.00.01.3.00.03.01.18.009.	Konsultasi dan bantuan hukum			Provinsi Riau		Jumlah ASN yang diberikan Konsultasi dan Bantuan	-	0	181.928.900	Sedang Berjalan	
TOTAL								23.978.315.808	21.357.490.016		



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2016 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

